

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian yaitu, penerapan *Good Governance* , standar akuntansi pemerintahan dan akuntabilitas keuangan, sedangkan yang menjadi subjek penelitian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Kabupaten Ciamis.

##### **3.1.1 Profil Kabupaten Ciamis**

Luas wilayah Kabupaten Ciamis setelah pemisahan wilayah Daerah Otonomi Baru Pangandaran adalah 1.433,87 km<sup>2</sup> dengan batas utara Kabupaten Majalengka dan Kuningan, batas selatan Kabupaten Pangandaran, batas barat Kabupaten dan Kota Tasikmalaya dan batas timur Kota Banjar Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduk Kabupaten Ciamis selama kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 1.237.726 jiwa. Kepadatan cukup tinggi juga dialami oleh Kecamatan Ciamis sebanyak 99,13 ribu jiwa dengan rata-rata penduduk 3.245 orang/km<sup>2</sup>, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan cimaragas sebanyak 16,13 ribu jiwa dengan rata-rata penduduk 700 orang /km . Perbandingan usia penduduk tidak produktif (usia 0-14 & 65+ tahun) dibanding usia produktif (usia 15-64 tahun) pada tahun 2017 sampai dengan 2021 menunjukkan angka peningkatan setiap tahunnya.

Sesuai dengan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Ciamis.

Untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah dalam melaksanakan seluruh urusan pemerintahannya. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dapat memberikan pedoman dalam melaksanakan seluruh urusan pemerintahan yang ada di daerah.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang masa berlaku efektifnya pada tanggal 1 Januari 2009. Peraturan Daerah tersebut telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Peraturan Daerah Nomor 25

Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

Dengan adanya Organisasi Perangkat Daerah yang baru tersebut maka beberapa SKPD telah mengalami perubahan struktur organisasi maupun kewenangan sesuai dengan ketentuan perda tersebut. Dengan berlakunya PP 18 Tahun 2016, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis disesuaikan melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

Dengan ditetapkannya PP 72 Tahun 2019, perda 8 Tahun 2016 diubah dengan perda 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis. Dengan adanya Organisasi Perangkat Daerah yang baru tersebut maka beberapa SKPD telah mengalami perubahan struktur organisasi maupun kewenangan sesuai dengan ketentuan perda tersebut. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas Daerah terdiri dari 18 Dinas yaitu:
  - a) Dinas Pendidikan

- b) Dinas Kesehatan
  - c) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
  - d) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
  - e) Dinas Sosial
  - f) Dinas Tenaga Kerja.
  - g) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - h) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - i) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - j) Dinas Perhubungan
  - k) Dinas Komunikasi dan Informatika
  - l) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.
  - m) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - n) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
  - o) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  - p) Dinas Pariwisata
  - q) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
  - r) Dinas Peternakan dan Perikanan
5. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari 5 Lembaga :
- a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - b) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - c) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - d) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C

- e) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 6. Satuan Polisi Pamong Praja
- 7. Kecamatan (27 Kecamatan)
- 8. Lembaga Lain (1 Lembaga) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

### **3.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Ciamis**

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Ciamis 2019 – 2024, Visi Kabupaten Ciamis yaitu “Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua”. Dengan diiringi misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah.
3. Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal.
4. Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
6. Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa.

## **3.2 Metode Penelitian**

### **3.2.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan Survei menggunakan kuesioner. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan cara statistik, yakni menganalisa dengan berbagai dasar statistik. Metode kuantitatif

sendiri yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada SKPD di kabupaten Ciamis, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat deskriptif statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019: 23).

### 3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel ini merupakan cara peneliti mengukur variabel yang ditunjukkan dengan indikator-indikator yang relevan terkait dengan prinsip *Good Governance*, Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Akuntabilitas keuangan. Hal ini bertujuan untuk melakukan skala pengukuran dalam mengolah data. Berikut adalah tabel operasionalisasi variabel:

**Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel**

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
1.	Penerapan <i>Good Governance</i> ( $X_1$ )	<i>good public governance/GPG</i> merupakan sistem atau aturan perilaku terkait dengan pengelolaan kewenangan oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan akuntabel. GPG pada dasarnya mengatur pola hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat serta antara penyelenggara negara dan lembaga negara (KNKG, 2008: 14)	Berdasarkan pedoman umum <i>good public governance</i> yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2008: 13): 1. Demokrasi 2. Transparansi 3. Akuntabilitas 4. Budaya Hukum 5. Kewajaran dan Kesetaraan	Interval
2.	Standar Akuntansi Pemerintahan ( $X_2$ )	Dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 dijelaskan Standar Akuntansi Pemerintahan atau biasa disingkat SAP merupakan pedoman dan acuan bagi	Berdasarkan Buku SAP yang disusun oleh KSAP dalam PP No. 71 Tahun 2010: 1. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal 2. Prinsip Periodesitas 3. Prinsip Konsistensi	Interval

	pemerintahan baik pusat atau daerah dalam mencatat sumber daya yang dinilai dengan uang untuk dipertanggungjawabkan dalam output berupa laporan keuangan	4. Prinsip Pengungkapan Lengkap 5. Prinsip Penyajian Wajar	
3.	Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (Y)	Istilah Akuntabilitas Keuangan Negara disamakan dengan istilah Tanggung Jawab Keuangan Negara. "Tanggung jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" (Wahyu Priono, 2016).	Menurut Wahyu Priono (2016) bentuk tanggungjawab keuangan negara dapat diwujudkan dalam tiga aspek pertanggungjawaban, yaitu: 1. Aspek Administrasi Keuangan 2. Aspek Kinerja 3. Aspek Hukum

Sumber: Diolah Penulis

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

#### 3.2.3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan terdiri data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Sumber data penelitian, sesuai dengan ruang lingkup kebutuhannya. Sumber data primer diperoleh dari responden, yaitu pegawai bidang keuangan di setiap SKPD Kabupaten Ciamis 2023. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

##### 1. Penarikan Kuesioner (Angket)

Teknik ini dilakukan dengan cara mengedarkan daftar pertanyaan (Kuesioner) untuk diisi oleh responden. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2019: 199).

## 2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku literatur maupun dokumen-dokumen, seperti peraturan dan kebijakan (*legal Formal*) yang berkaitan dengan subjek penelitian.

### 3.2.3.2 Populasi Sasaran

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang memiliki karakteristik dan kuantitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan untuk hasil penelitian. Menurut Corper, Etc dalam Sugiyono (2019: 145) populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah inferensi/generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subjek yang akan diukur, yang merupakan unit yang akan diteliti. Maka dari itu bahwa yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah bagian keuangan dari setiap SKPD yang ada di Kabupaten Ciamis, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3. 2 Populasi Penelitian**

No	Nama SKPD
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3	Inspektorat Daerah
4	Dinas Pendidikan
5	Dinas Kesehatan
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



No	Nama SKPD
8	Dinas Sosial
9	Dinas Tenaga Kerja
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Dinas Perhubungan
14	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19	Dinas Pariwisata
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
21	Dinas Peternakan dan Perikanan
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
26	Satuan Polisi Pamong Praja
27	Kecamatan (27 Kecamatan)
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

*Sumber: Diolah Penulis*

### 3.2.3.3 Penentuan Sampel

Menurut Sugiyono (2019: 146) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Mengingat metode yang digunakan survey, maka untuk pengambilan sampel penelitian akan menggunakan *Purposive Sampling* dimana pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu Sugiyono (2019: 124).

Kriteria Penentuan Sampel sebagai berikut:

1. SKPD yang terdapat di Kabupaten Ciamis sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

2. SKPD yang merupakan unsur pelaksana dan unsur pendukung sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

Setelah dilakukan seleksi sampel terhadap 54 SKPD yang terdapat di Kabupaten Ciamis dengan kriteria yang sudah ditetapkan di atas, maka diperoleh sampel penelitian sebanyak 22 SKPD.

**Tabel 3. 3 Kriteria Purposive Sampling**

No	Nama SKPD	Jumlah
	SKPD Kabupaten Ciamis	54
1	SKPD Unsur Sekretariat	(2)
2	SKPD Unsur Inspektorat	(1)
3	SKPD Unsur Kewilayahan	(27)
4	SKPD Unsur Lainnya	(2)
	Jumlah SKPD yang memenuhi kriteria	22
	Jumlah Responden Setiap SKPD	2
	Jumlah Sampel	44

Sumber: Diolah Peneliti

Berikut SKPD yang termasuk kedalam sampel penelitian setelah dilakukan

*Purposive sampling* yaitu:

**Tabel 3. 4 Sampel Penelitian**

No	Nama SKPD
1	Dinas Pendidikan
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
5	Dinas Sosial
6	Dinas Tenaga Kerja
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	Dinas Perhubungan
11	Dinas Komunikasi dan Informatika
12	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

No	Nama SKPD
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16	Dinas Pariwisata
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18	Dinas Peternakan dan Perikanan
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
20	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: Diolah Peneliti

Untuk memenuhi kecukupan data penelitian maka diambil jawaban kuesioner dua responden untuk setiap sampel atau SKPD yang dipilih. Menurut Roscoe dalam Sugiyono (2019: 163) “Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 500”.

### 3.2.3.4 Prosedur Pengumpulan Data

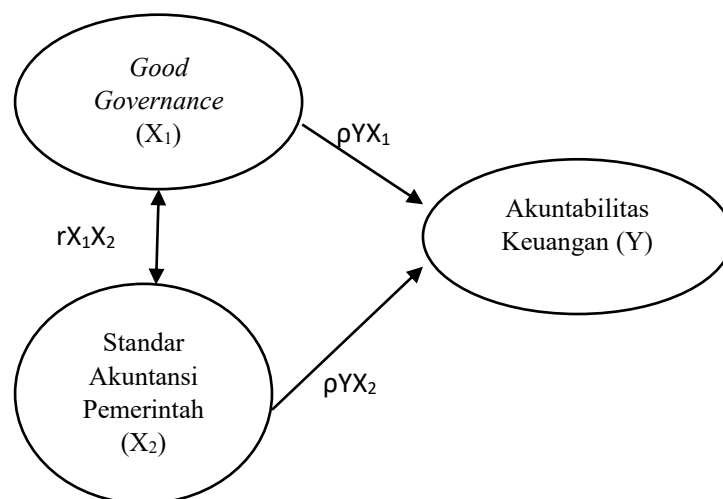
Data yang dikumpulkan berupa data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari obyek penelitian, sesuai ruang lingkup dan kebutuhannya. Pengumpulan dengan data primer ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian serta untuk memperoleh informasi dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang memadai.

Prosedur pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah menyebarkan kuesioner kepada SKPD yang dipilih di Kabupaten Ciamis. Kuesioner dalam penelitian ini mendefinisikan kegiatan operasionalisasi variabel yang diteliti kedalam indikatornya masing-masing, selanjutnya indikator tersebut dijabarkan melalui bentuk pertanyaan. Untuk menentukan skor pada penelitian ini menggunakan skala interval yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Sehingga (Sugiyono, 2019: 134).

### 3.3 Model Penelitian

Model penelitian yang oleh peneliti yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey, menurut Sugiyono (2019: 23) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel pada umumnya dilakukan dengan secara random, pengumpulan, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Metode survey digunakan untuk mendapatkan data dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur, dan sebagainya. Metode survey digunakan untuk mempelajari data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian dan hubungan antar variabel sosiologis dan psikologis.



**Gambar 3. 1 Model Penelitian**

### 3.4 Teknik Analisis Data

#### 3.4.1 Teknik Pengolahan Data

Data mentah yang diperoleh dari dari jawaban responden terhadap instrumen penelitian (Kuesioner) yang disebar harus diolah menjadi data baku,

instrument penelitian yang dibuat bertujuan untuk mentransformasikan data kualitatif agar dapat dianalisis dengan metode statistika yang diterapkan. Dan dalam penelitian ini penulis akan menggunakan SPSS sebagai alat bantu pengolahan data.

Adapun perubahan instrument meliputi:

1. Pendefinisian operasionalisasi variabel kedalam indikatornya
2. Menjabarkan indikator kedalam pernyataan
3. Pemberian skala pengukuran untuk setiap jawaban responden

Format kuesioner untuk memuat pernyataan responden berbentuk multiple choice, dengan kelebihan mudah ditabulasi dan tepat untuk kuesioner yang diisi sendiri. Untuk analisis kuantitatif maka pemberian skor untuk setiap item kuesioner digunakan skala interval yang jumlahnya ganjil dengan nilai 1 sampai 5.

Dengan skala interval yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel maka hasil kuesioner sudah menunjukkan sebuah skala interval penilaian sehingga tidak perlu diubah ke MSI (Ghozali (2016)).

Item yang disusun harus terdiri dari item positif dan negatif. Adapun daftar pernyataan dengan menetapkan skala interval pada alternatif jawaban yang dapat dinilai dengan skor sebagai berikut:

**Tabel 3. 5 Bobot Pertanyaan**

Keterangan	Bobot	
	Pernyataan Positif	Pernyataan Negatif
Sangat Setuju	5	1
Setuju	4	2
Kurang Setuju	3	3
Tidak Setuju	2	4
Sangat Tidak Setuju	1	5

Perhitungan hasil kuesioner dengan persentase dan scoring menggunakan rumus sebagai berikut:

$$X = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Jumlah Persentase Jawaban

F = Jumlah Jawaban

N = Jumlah Responden

Setelah diketahui jumlah nilai dari keseluruhan sub variabel maka dapat ditentukan intervalnya, yaitu sebagai berikut:

$$NJI = \frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}}{\text{jumlah kriteria pernyataan}}$$

### 3.4.2 Uji Kualitas Data

#### 3.4.2.1 Pengujian Validitas Alat Ukur

Pengujian validitas alat ukur penelitian dapat mewujudkan sejauh mana alat yang digunakan dalam penelitian mampu mengukur variabel yang terdapat dalam penelitian. Dengan kata lain, validitas alat ukur penelitian merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat akurasi alat ukur tersebut. Alat ukur yang salah akan mempunyai validitas yang rendah, begitupula sebaliknya.

Pengujian validitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi dari masing-masing pertanyaan melalui total skor, dengan menggunakan rumus korelasi produk momen. Prosedur uji validitas yaitu dengan membandingkan r hitung dengan r tabel yaitu angka kritis tabel korelasi dengan derajat kebebasan ( $dk = n-2$ ) dengan taraf signifikan  $\alpha = 5\%$ .

Kriteria Pengujian:

Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka pernyataan tersebut valid

Jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel, maka pernyataan tersebut tidak valid.

### 3.4.2.2 Pengujian Reliabilitas Alat Ukur

Reliabilitas menunjukkan stabilitas dan konsistensi dari suatu instrumen yang mengukur suatu konsep dan berguna untuk mengakses kebaikan dari suatu pengukur. Suatu pengukur dikatakan reliabel (dapat diandalkan) jika dapat dipercaya. Supaya dapat dipercaya, maka hasil dari pengukuran harus akurat dan konsisten. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan teknik cronbach. Untuk mempermudah perhitungan uji reliabilitas akan menggunakan bantuan program SPSS. Dari hasil perhitungan tersebut, maka kaidah keputusannya adalah:

Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka pernyataan tersebut reliabel

Jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel, maka pernyataan tersebut tidak reliabel.

## 3.5 Analisis Data dan Rancangan Pengujian Hipotesis

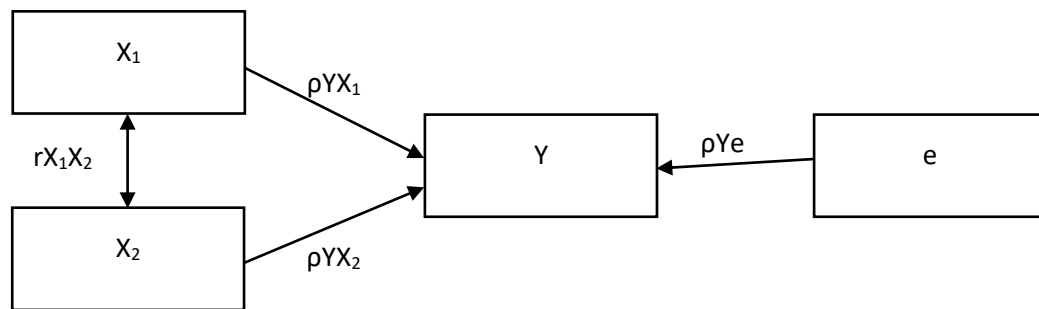
### 3.5.1 Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data diperlukan agar penelitian dapat menghasilkan hasil yang dapat dipercaya.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan analisis jalur (*Path Analysis*) karena peneliti ingin memastikan apakah ada pengaruh antara penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan.

Menurut Ghozali (2016: 237), analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, sehingga analisis regresi dapat diartikan sebagai

bentuk khusus dari analisis jalur. Tujuannya adalah untuk menerangkan akibat langsung dan tidak langsung seperangkat variabel, sebagai variabel penyebab, terhadap variabel lainnya yang merupakan variabel akibat.



Keterangan:

- $X_1$  = Penerapan *Good Governance*
- $X_2$  = Standar Akuntansi Pemerintahan
- $Y$  = Akuntabilitas Keuangan
- $e$  = Faktor lain yang diketahui
- $r_{X_1X_2}$  = Koefisien Korelasi variabel  $X_1$  terhadap  $X_2$
- $\rho_{YX_1}$  = Koefisien Korelasi variabel  $X_1$  terhadap  $Y$
- $\rho_{YX_2}$  = Koefisien Korelasi variabel  $X_2$  terhadap  $Y$
- $\rho_{Ye}$  = Koefisien Korelasi variabel  $e$  terhadap  $Y$

Dari struktur analisis jalur di atas, terdapat langkah-langkah yang digunakan yaitu:

1. Menghitung Koefisien Korelasi ( $r$ )

Koefisien korelasi ini akan menentukan tingkat keeratan hubungan antara variabel yang diteliti. Menghitung koefisien korelasi antara  $X_1$  dan  $X_2$  menggunakan rumus koefisien sederhana yaitu:



$$r_{xy} = \frac{n\Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{[N\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2][N\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2]}}$$

Jika tingkat hubungan antar variabel kuat, maka nilai r akan besar. Demikian pula sebaliknya jika tingkat hubungan antar variabel rendah maka nilai r akan kecil. Besar koefisien korelasi ini akan diinterpretasikan sebagai berikut:

**Tabel 3. 6 Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,80 – 1.000	Sangat Kuat
0,60 – 0,799	Kuat
0,40 – 0,599	Cukup Kuat
0,20 – 0,399	Rendah
0,00 – 0,199	Sangat Rendah

Sumber: Sugiyono (2019:152)

2. Pengujian secara simultan

$$\rho_{YX_i} = b_{YX_i} \sqrt{\frac{\sum_{h=1}^n x_i h^2}{\sum n Y h^2}}$$

$\rho_{YX_i}$  = Koefisien jalur dari variabel  $X_1$  terhadap Y

$b_{YX_i}$  = Koefisien regresi dari variabel  $X_1$  terhadap Y

3. Pengujian faktor residu

$$\rho_{Y_i} = \sqrt{1 - R^2 Y_{x_1 x_2 \dots x_x}}$$

$$\text{Dimana } R^2 Y_{X_1 X_2 \dots X_k} = \sum_{t=1}^k \rho_{Y_1 x_1} r_{Y x_1}$$

4. Pengujian hipotesis operasional

Menguji keberartian (signifikan) dari hubungan variabel  $X_1$  dengan variabel  $X_2$ .

$$H_0 = R_{X_2 X_1} < 0$$

$$H_1 = R_{X_2 X_1} \geq 0$$

Dengan kriteria penolakan  $H_0$  jika  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel

a. Pengujian secara simultan

Hipotesis Operasional

$$H_0 : \rho_{YX_1} = \rho_{Y_1X_2} = 0$$

$$H_a : \text{sekurang-kurangnya terdapat } : \rho_{YX_1} \neq 0$$

Dengan kriteria penolakan  $H_0$  jika  $f$  hitung  $>$   $f$  tabel

Uji signifikansi menggunakan rumus:

$$F = \frac{(n-k-1)R^2_{YX_1X_2\dots X_k}}{K(1-R^2_{YX_1X_2\dots X_k})}$$

b. Pengujian secara parsial

Hipotesis Operasional

$$H_0 = -t^{1/2} \alpha \leq t \text{ hitung atau } t \text{ hitung} \leq t^{1/2} \alpha$$

$$H_a = -t^{1/2} \alpha > t \text{ hitung atau } t \text{ hitung} > t^{1/2} \alpha$$

Koefisien penolakan  $H_0$  jika  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel

Uji statistik menggunakan rumus distribusi dengan derajat bebas  $n-k-1$ :

$$t = \frac{\rho_{YX_1}}{\sqrt{\frac{1-R^2_{YX_1X_2\dots X_k}}{(n-k-1)R^2_{YX_1X_2\dots X_k}}}}$$

Keterangan:

$\rho_{YX_1}$  = Koefisien jalur (besarnya pengaruh) variabel  $X_1$  terhadap  $Y$

$R^2_{YX_1X_2\dots X_k}$  = Koefisien yang menyatakan determinasi total dari semua variabel penyebab terhadap variabel akibat

$R^2_{YX^1X^2\dots(X_1)\dots X_k}$  = Koefisien yang menyatakan determinasi multiple antara  $X_i$  dengan  $X_1, \dots, X_k$  tanpa  $X_i$

Untuk mengetahui total pengaruh variabel  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap  $Y$ , baik secara langsung maupun tidak langsung disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. 7**  
**Contoh Formula Untuk Mencari Pengaruh Langsung Dan Tidak Langsung Antara Variabel Penelitian**

No	Pengaruh Langsung	Pengaruh tidak Langsung	Total pengaruh
1	$Y - X_1 - Y = (\rho_{YX_1})^2$		A
		$\rho_{YX_1r_{X_1X_2}} \rho_{YX_2}$	B
	Total Pengaruh $X_1$ terhadap $Y$	A + B	C
2	$Y - X_2 - Y = (\rho_{YX_2})^2$		D
		$\rho_{YX_1r_{X_1X_2}} \rho_{YX_2}$	E
	Total Pengaruh $X_2$ terhadap $Y$	D + E	F
	Total pengaruh $X_1$ dan $X_2$ terhadap $Y$	C + F	G
	Pengaruh Residu	100% - G	H

### 3.5.2 Rancangan Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis akan dimulai dengan penetapan hipotesis operasional, penetapan tingkat signifikansi, uji signifikan, kriteria dan penarikan kesimpulan.

#### 1. Penetapan Hipotesis Operasional

Pada penetapan hipotesis yang akan diuji dimaksudkan untuk melihat ada tidaknya pengaruh antar variabel-variabel penelitian, hipotesis yang digunakan adalah:

$H_{01} : \rho_{X_2X_1} = 0$  : Tidak terdapat hubungan signifikan antara penerapan *Good Governance* dan standar akuntansi pemerintah

$H_1 : \rho_{X_2X_1} \neq 0$  : Terdapat hubungan signifikan antara penerapan *Good Governance* dan standar akuntansi pemerintah

- $H_{02} : \rho_{YX_1} = 0$  : Penerapan *Good Governance* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.
- $H_2 : \rho_{YX_1} \neq 0$  : Penerapan *Good Governance* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.
- $H_{03} : \rho_{YX_2} = 0$  : Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.
- $H_3 : \rho_{YX_2} \neq 0$  : Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.
- $H_{04} : \rho_{YX_1} = \rho_{YX_2} = 0$  : Penerapan *Good Governance* dan standar akuntansi pemerintahan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintahan.
- $H_4 : \rho_{YX_1} = \rho_{YX_2} \neq 0$  : Penerapan *Good Governance* dan standar akuntansi pemerintahan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintahan.

## 2. Penetapan Tingkat Signifikansi

Taraf signifikansi ( $\alpha$ ) ditetapkan sebesar 5% ini berarti kemungkinan kebenaran hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95% atau toleransi kekeliruan 5%. Taraf signifikan ini adalah tingkat yang umum digunakan dalam penelitian sosial karena dianggap cukup lekat untuk mewakili hubungan antara variabel yang diteliti.

## 3. Uji Signifikansi

Untuk melakukan uji signifikansi dilakukan 2 pengujian, yaitu:

- Secara simultan menggunakan uji F

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, Imam. 2016: 84). Apabila nilai F hitung  $\geq F$  tabel, maka setidaknya salah satu dari kedua variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

- Secara parsial menggunakan uji t

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dan menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, Imam. 2016: 84).

#### 4. Kriteria Pengujian

Secara Parsial:

- Terima  $H_0$  jika  $-t^{1/2} \alpha \leq t \leq t^{1/2}$
- Tolak  $H_0$  jika  $t < -t^{1/2}$  atau  $t > t^{1/2} \alpha$

Secara simultan:

- Terima  $H_0$  jika F hitung  $\leq F$  tabel
- Tolak  $H_0$  jika F hitung  $> F$  Tabel

#### 5. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis, ditarik kesimpulan apakah hipotesis yang telah ditetapkan itu diterima atau ditolak.